**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan**

Pengungkapan adalah informasi yang disediakan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien. Menurut Nuswandari (2009:73) Tujuan pengungkapan yaitu untuk memberikan informasi yang dirasa perlu disampaikan untuk memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk mencapat tujuan dari pelaporan keuangan. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) bahwa tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi bagi investor, kreditor, dan pemakai eksternal lain untuk mengambil keputusan investasi, kredit dan lainnya.

Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui dua media, yaitu media bentuk finansial yang berbentuk laporan tahunan dan media non finansial yang dapat dilakukan dengan jumpa pers. Kelengkapan informasi dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah sangat berpengaruh pada masyarakat, investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan yang lengkap dapat lebih menarik minat dan perhatian public serta mempermudah masyarakat atau pihak lain dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan.

Menurut Chariri & Ghazali, (2003:17), pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu :

* + 1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan.

* + 1. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami startegi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Menurut (Chariri & Ghazali, 2003:19), terdapat tiga konsep pengungkapan, yaitu :

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*)

Pengungkapan yang cukup merupakan pengungkapan yang mengandung jumlah minimal pengungkapan sesuai tujuan pelaporan keuangan agar tidak menyesatkan pengambil keputusan.

1. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*)

Pengungkapan yang wajar pengungkapan yang menunjukkan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.

1. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*)

Pengungkapan yang lengkap merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya dan materialitas.

Menurut Arifin (2012:29) Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi bukannya mengurangi karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit dianalisis. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus bisa memberikan informasi informasi atas kinerja keuangan pemerintah yang relevan, akurat, konsisten, tepat waktu dan dapat dipercaya. Laporan keuangan pemerintah disajikan secara lengkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban, kontijensi, dan komitmen-komitmen lainnya.

1. ***Intergovernmental Revenue***

Menurut Standar akuntansi pemerintahan *Intergovernmental revenue* adalah pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai operasional daerah. *Intergovernmental revenue* disebut juga dana perimbangan. Menurut Santri (2006:35) *Intergovernmental revenue* merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal. Tujuan dana perimbangan, sebagai berikut:

a) Untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan anggaran pembangunan yang memadai

b) Untuk mengintensifikasikan aktifitas dan kreatifitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki masing- masing daerah

* + 1. Untuk mendudkung terwujudnya good governance, tata pemerintahan yang baik
    2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, efektif dan efisien

Menurut Cahyat (2004:47) pada pemerintahan desentralisasi ini, pengawasan pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah seharusnya dapat lebih efektif. Pengawasan oleh pemerintah pusat dilakukan dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal. *Intergovermnetal revenue* berasal dari APBN yang terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut PP No. 55 Tahun 2005, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari :

* 1. Pajak, meliputi :
     1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
     2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
     3. PPh WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh Pasal 21
  2. Sumber daya alam, meliputi :
     1. Kehutanan
     2. Pertambangan umum
     3. Perikanan
     4. Pertambangan minyak bumi
     5. Pertambangan gas bumi

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No 55 Tahun 2005, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten.kota dengan pembagian proporsinya dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut PP No 55 Tahun 2005, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK digunakan untuk membiayai pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memiliki unsur ekonomi panjang. DAK juga dapat digunakan untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

1. ***Leverage***

Menurut Andriky (2015), *Leverage* diartikan sebagai “Rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal”.

Menurut Minarsih (2015) didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang.

1. **Kekayaan Daerah**

Kekayaan daerah dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Menurut Tahar & Zakhiya (2011:23) tujuan PAD yaitu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan memberikan pendanaan untuk mengembangkan potensi daerahnya sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Menurut Sudarsana (2013:17) definisi Pendapatan Asli Daerah adalah:

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerahnya serta mengurangi tingkat ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sumber-sumber penerimaan PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6, yaitu :

1. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 definisi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Terdapat 2 jenis pajak daerah, yaitu :

* + - 1. Pajak provinsi, meliputi :
         1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
         2. Bea balik bama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
         3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
         4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
      2. Pajak kabupaten/kota, meliputi :
         1. Pajak hotel
         2. Pajak restoran
         3. Pajak hiburan
         4. Pajak reklame
         5. Pajak penerangan jalan
         6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C5
         7. Pajak parkir

1. Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 3 jenis retribusi daerah, yaitu :

1) Retribusi jasa umum, meliputi :

* + - * 1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu
        2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
        3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
        4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
        5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
        6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, seta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
        7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik

2) Retribusi jasa usaha, meliputi :

* + - * 1. Retribusi jasa bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
        2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah
      1. Retribusi perizinan tertentu,meliputi :
         1. Perizinan tersebut temasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
         2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
         3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menaggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berbentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang merupakan badan usaha yang dibentuk oleh daerah yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah agar dapat mengingkatkan penghasilan daerah. Jenis pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi :

* + - 1. Bagian laba perusahaan milik daerah
      2. Bagian laba lembaga keuangan daerah
      3. Bagian laba lembaga keuangan non bank
      4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

Contoh BUMD yang pada umumnya dimiliki oleh daerah yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
3. Badan kredit kecamatan
4. Pasar
5. Tempat hiburan/rekreasi
6. Villa atau pesanggrahan
7. Lain-lain keuntungan yang menjadi penghasilan bagi daerah yang bersangkutan
8. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lainnya. Pendapatan ini berasal dari pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis-jenis dari lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

Menurut Soekarwo (2003:18) terdapat tiga cara untuk mengoptimalkan PAD, yaitu :

1. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada, dalam arti operasional pemungutannya. Contoh : Pengawasan, tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
2. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Sehingga perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
   1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama dan Tahun Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| Wulandari Arum 2016 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014 | X1 : *Intergovernmental Revenue*  X2 : Kekayaan Daerah  X3 : Pembiayaan Utang  X4 : Jumlah Penduduk  Y : Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial | *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial, Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial, Pembiayaan Utang tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial, Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial | 1. Meneliti dengan menggunakan tiga variabel independen yang sama yaitu *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah.  2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Jumlah Penduduk*.*  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Yogyakarta, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. |
| Retnowati Reny 2016 | Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013 | X1 : Tingkat Kekayaan Daerah  X2 : Belanja Daerah  X3 : Ukuran Pemerintah Daerah  X4 : Leverage  X5 : *Intergovernmental Revenue*  Y : Kinerja Keuangan Daerah | Belanja Daerah dan Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan daerah, sedangkan Tingkat kekayaan daerah, leverage, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah | 1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independen yang sama yaitu *Intergovernmental Revenue* dan *Leverage.* | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Tingkat Kekayaan Daerah,Belanja Daerah,Ukuran Pemerintah Daerah,  2. Variabel dependent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Kinerja Keuangan Daerah.  3. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. |
| Praptiningsih Dwi Syawaltika Febryani 2014 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2014. | X1 : Opini Audit  X2 : Karakteristik Ukuran Daerah  X3 : *Intergovernmental Revenue*  X4 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  X5 : Kemandirian Daerah  X6 : Spesialisasi Pekerjaan  Y : Belanja Bantuan Sosial | Opini audit, Karakteristik pemerintah daerah, dan spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap Belanja Bantuan Sosial sedangkan Imtergovernmental revenue, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial | 1. Meneliti dengan menggunakan satu variabel independen yang sama yaitu *Intergovernmental Revenue* | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Opini Audit, Karakteristik Ukuran Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Kemandirian Daerah, Spesialisasi Pekerjaan  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Jawa, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. |
| Lesmana Sigit I 2010 | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. | X1 : Ukuran Pemerintah Daerah  X2 : Kewajiban  X3 : Pendapatan Transfer  X4 : Umur Pemerintah Daerah  X5 : Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  X6 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  Y : Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Umur pemerintah daerah dan Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan wajib LKPD, sedangkan Ukuran pemerintah daerah, Kewajiban, Pendapatan transfer, Jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD | 1. Meneliti dengan menggunakan satu variabel dependen yang sama yaituPengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Kewajiban, Pendapatan Transfer, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Yogyakarta, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. |
| Darmasuti Dewi, Setyaningrum Dyah 2009 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009 | X1 : Kapasitas Fiskal  X2 : Legislature Size  X3 : Diferensiasi Fungsional  X4 : Spesialisasi Pekerjaan  X5 : Ukuran Pemerintah Daerah  X6 : Umur administratif Pemerintah Daerah  X7 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  X8 : Pembiayaan Utang  X9 : *Intergovernmental Revenue*  Y : Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada LKPD pada tahun 2009 | Legislature Size Rasio kemandirian keuangan daerah, *Intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Kapasitas Fiskal, Diferensiasi fungsional, Spesialisasi pekerjaan, Ukuran pemerintah daerah, Umur administratif pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial | 1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independen yang sama yaitu *Intergovernmental Revenue*  2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Kapastias Fiskal, Legislature Size, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Admnistratif Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah Republik Indonesia sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. |
| Setyowati Lilis 2008 | Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | X1 : Aset  X2 : Kekayaan  X3 : Diferensiasi Fungsional  X4 : *Debt*  X5 : *Intergovernmental Revenue*  X6 : Pembangunan Manusia  Y : Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Aset berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kekayaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,  Diferensiasi Fungsional tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Debt* tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial  Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Meneliti dengan menggunakan tiga variabel independen yang sama yaitu Kekayaan Daerah, *Debt* dan *Intergovernmental Revenue* | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Aset, Diferensiasi Fungsiomal, dan Pembangunan Manusia  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah Republik Indonesia sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. |

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh *intergovernmental revenue, Leverage*, kekayaan daerah terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1.

Semakin besar *intergovernemental revenue* mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal.

Organisasi dengan level pembiayaan utang yang tinggi akan diminta untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum Maka dari itu *leverage* digunakan untuk menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak terbayarnya suatu utang

Tingkat kekayaan suatu daerah dapat dilihat melalui jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan semakin besar pendapatan yang diterima daerah maka semakin besar pengungkapan yang harus dilakukan dalam laporan keuangannya.

***Intergovernmental Revenue* (X1)**

**H1**

**Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial (Y)**

***Leverage* (X2)**

**H2**

**Kekayaan Daerah (X3)**

**H3**

**H4**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu *Intergovernmental Revenue (*X1), *Leverage* (X2), *Kekayaan Daerah* (X3) terhadap variabel dependen yaitu Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial (Y) baik secara simultan maupun parsial.

**2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1: Diduga *Intergovernmental Revenue* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial

H2: Diduga *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial

H3: Diduga Kekayaan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial

H4: Diduga *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, dan kekayaan daerah berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.